



DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

JL. RAJA HAJI NO.5 SEKUPANG - BATAM



LKjIP - 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Batam 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam 2021-2026. Dinas Perikanan Kota Batam merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Misi Pertama: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, Tujuan kedua: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif, Sasaran ke-enam: Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.

Untuk mewujudkan amanah RPJMD tersebut, ditetapkanlah **Tujuan Dinas Perikanan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan** dengan indikator pengukuran kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN). Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan pula **Sasaran Dinas Perikanan yaitu: Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan**, dengan Indikator pengukuran kinerja yaitu:

- Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil;
- Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan;
- Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.

Keempat indikator tersebut telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam.

Pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 seluruhnya berpredikat “**SANGAT TINGGI**”.
- Capaian indikator kinerja utama dibandingkan dengan target Renstra sebagai berikut:
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) telah mencapai 98,88%;
 - Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil telah mencapai 100%;
 - Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan telah mencapai 100%;



- Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan telah mencapai 100%.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Perikanan Kota Batam 2021-2026, pada 2024 dilaksanakan Program dan kegiatan yang meliputi 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan. Dari hasil analisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, keempat program tersebut terlaksana dengan efektif dan efisien. Sembilan kegiatan telah berhasil dilaksanakan secara efisien.

KINERJA KEUANGAN

Pagu anggaran belanja langsung APBD Kota Batam T.A. 2024 yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Batam untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator kinerja Tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 25.785.595.542,- (Dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.943.020.709,- (Dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) capaian **96,73%**.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan strategis pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap semua Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional serta seluruh staf pada awal tahun anggaran 2024 untuk membuat pernyataan kontrak kinerja berjenjang (Cascading) sebagai wujud komitmen dan kesungguhan untuk bekerja secara amanah, professional dan peduli dalam rangka mewujudkan target indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2024 dan target indikator kinerja aparatur PNS. Evaluasi cascading dilaksanakan setiap triwulan dan disupervisi langsung oleh Kepala Dinas. Pengumpulan data kinerja cascading dilaksanakan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dapat diselesaikan. Tahun ini adalah tahun awal mewujudkan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang di dalamnya memuat pernyataan tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kota Batam akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Batam, Februari 2025
Dinas Perikanan Kota Batam
Kepala

Yudi Admajianto, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Gambaran Umum Wilayah Kerja	I-3
1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan	I-5
1.5. Sistematika dan Kerangka Penyusunan LKjIP	I-15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	II-1
A. Visi dan Misi	II-1
B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-3
C. Indikator Kinerja Utama	II-7
2.2. Perjanjian Kinerja	II-9
2.3. Program dan Kegiatan	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	III-2
B. Pencapaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Tahun 2024	III-20
3.2. Realisasi Anggaran	III-23
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024	IV-1
4.2. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2024	IV-1
4.3. Permasalahan	IV-2
4.4. Rekomendasi	IV-2

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah SDM Menurut Jabatan Tahun 2024	I-8
Tabel 1.2	Jumlah SDM Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2024.....	I-8
Tabel 1.3	Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	I-8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024	II-7
Tabel 2.3	Target Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan.....	II-14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-1
Tabel 3.2	Capaian Indikator Tujuan Dinas Perikanan Tahun 2024.....	III-3
Tabel 3.3	Peningkatan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022-2024.....	III-3
Tabel 3.4	Capaian Indikator 1 Sasaran Dinas Perikanan	III-4
Tabel 3.5	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Nelayan Kecil 2021-2024	III-4
Tabel 3.6	Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	III-5
Tabel 3.7	Peningkatan Jumlah Armada Nelayan Kecil Tahun 2021 - 2024	III-6
Tabel 3.8	Jumlah Alat Penangkap Ikan Tahun 2018 - 2022	III-6
Tabel 3.9	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dibentuk dan Dikembangkan Dinas Perikanan Tahun 2021-2024.....	III-7
Tabel 3.11	Jumlah BBM dan Surat Rekomendasi Yang Dikeluarkan untuk Nelayan Kecil Tahun 2021 – 2024	III-8
Tabel 3.12	Ketersediaan Data dan Informasi Perikanan tangkap Tahun 2021 - 2024.....	III-9
Tabel 3.13	Capaian Indikator ke-2 Sasaran Dinas Perikanan.....	III-9
Tabel 3.14	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2021 - 2024	III-10



Tabel 3.15	Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2024	III-10
Tabel 3.16	Jumlah Sarpras Budidaya Tahun 2021 - 2024	III-11
Tabel 3.17	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Tahun 2021 - 2024.....	III-11
Tabel 3.18	Ketersediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Tahun 2021 - 2024	III-12
Tabel 3.19	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya Tahun 2021 - 2024.....	III-12
Tabel 3.20	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tahun 2021-2024.....	III-13
Tabel 3.21	Capaian Indikator ke-3 Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024	III-13
Tabel 3.22	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2021-2024	III-14
Tabel 3.23	Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2024	III-15
Tabel 3.24	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Tahun 2021-2024	III-16
Tabel 3.25	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Tahun 2021-2024.....	III-16
Tabel 3.26	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Skala Mikro dan Kecil yang Terfasilitasi Tahun 2021-2024.....	III-17
Tabel 3.27	Ketersediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2021-2024	III-17
Tabel 3.28	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan Tahun 2021-2024.....	III-18
Tabel 3.29	Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target pada Perjanjian Kinerja.....	III-19
Tabel 3.30	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2021-2026.....	III-22
Tabel 3.31	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024	III-23
Tabel 3.32	Anggaran, Realisasi, dan Sisa Anggaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024	III-24



Tabel 3.33	Analisa Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024	III-25
Tabel 3.34	Analisa Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Anggaran Tahun 2024.....	III-26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Batam	I-4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	I-7
Gambar 3.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-23



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka Dinas Perikanan Kota Batam berkomitmen kuat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) sebagai penjabaran amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang memberikan gambaran seluas dan seobyektif mungkin mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam, diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan pada Dinas Perikanan Kota Batam atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Perikanan



1.3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

Kota Batam merupakan Daerah Otonom yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Wilayah Kota Batam memiliki luas daratan 1.038,84 Km² dan luas wilayah perairan 2.791,09 Km² yang mencakup 6 pulau besar yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Bulan, Pulau Kepala Jeri, dan dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar perbatasan negara beberapa gugus pulau-pulau kecil di sekitarnya.

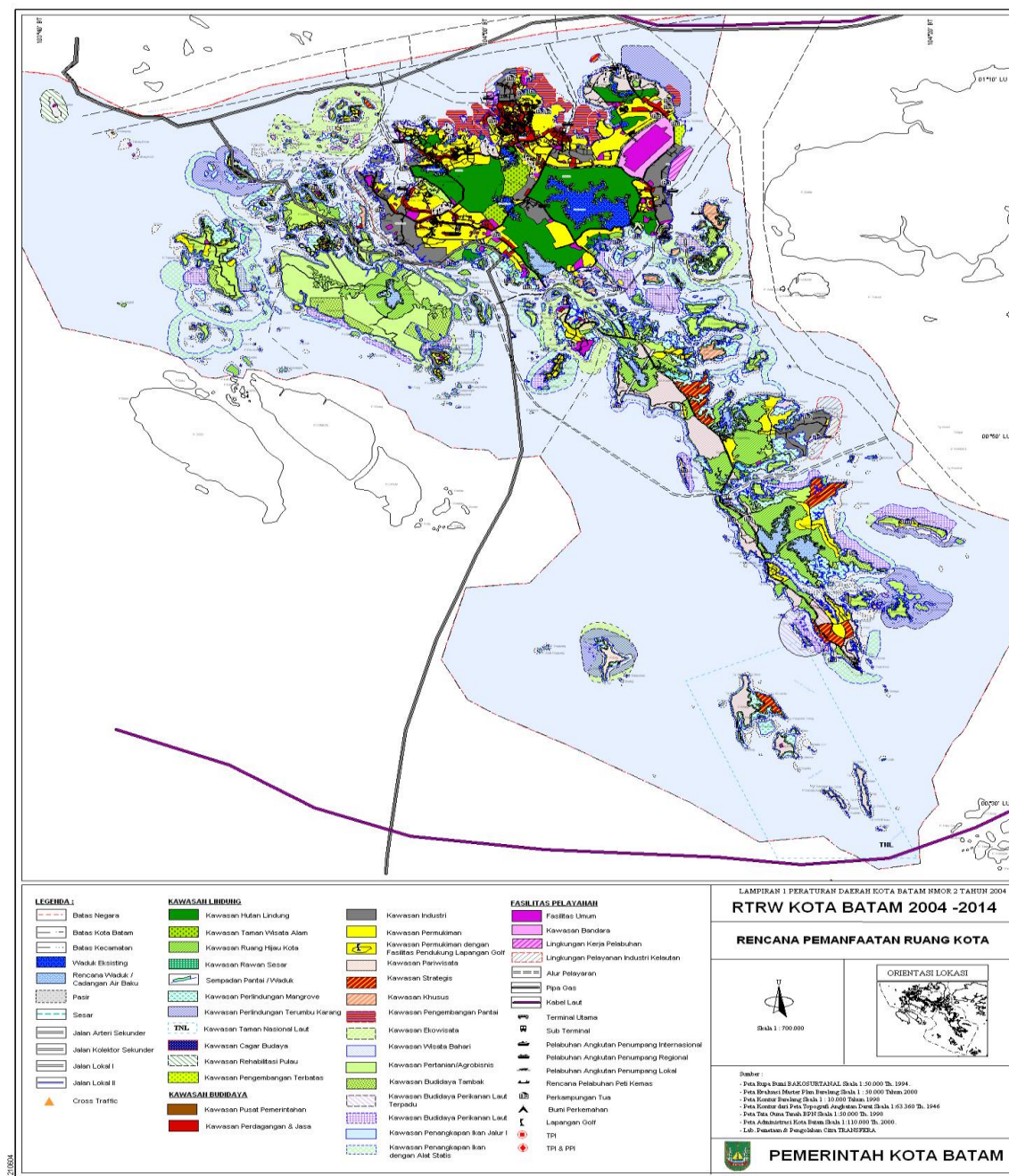
Secara Administratif, Kota Batam memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Bengkong. Wilayah Kota Batam ini terdiri lebih yang dihuni oleh 1.329.773 jiwa penduduk pada Tahun 2018.

Secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0°25'29" LU – 1°15'00" LU dan 103°34'35" BT – 104°26'04" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Timur : Pulau Bintan
- Sebelah Selatan : Kab. Lingga
- Sebelah Barat : Semenanjung Karimun, Kab. Karimun



Gambar1.1 Peta Kota Batam





1.4 Gambaran Umum Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Batam merupakan pemisahan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam No.78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam No.24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.
- 3) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Tangkap, termasuk di dalamnya:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Tangkap.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Tangkap.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Tangkap, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Tangkap.
- 4) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan



pelaksanaan rencana program kerja bidang perikanan budidaya, termasuk didalamnya:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Budidaya.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Budidaya.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Budidaya, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Budidaya
- 5) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, termasuk didalamnya:
- a) Penyusunan rencana dan program lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, termasuk didalamnya:
- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.

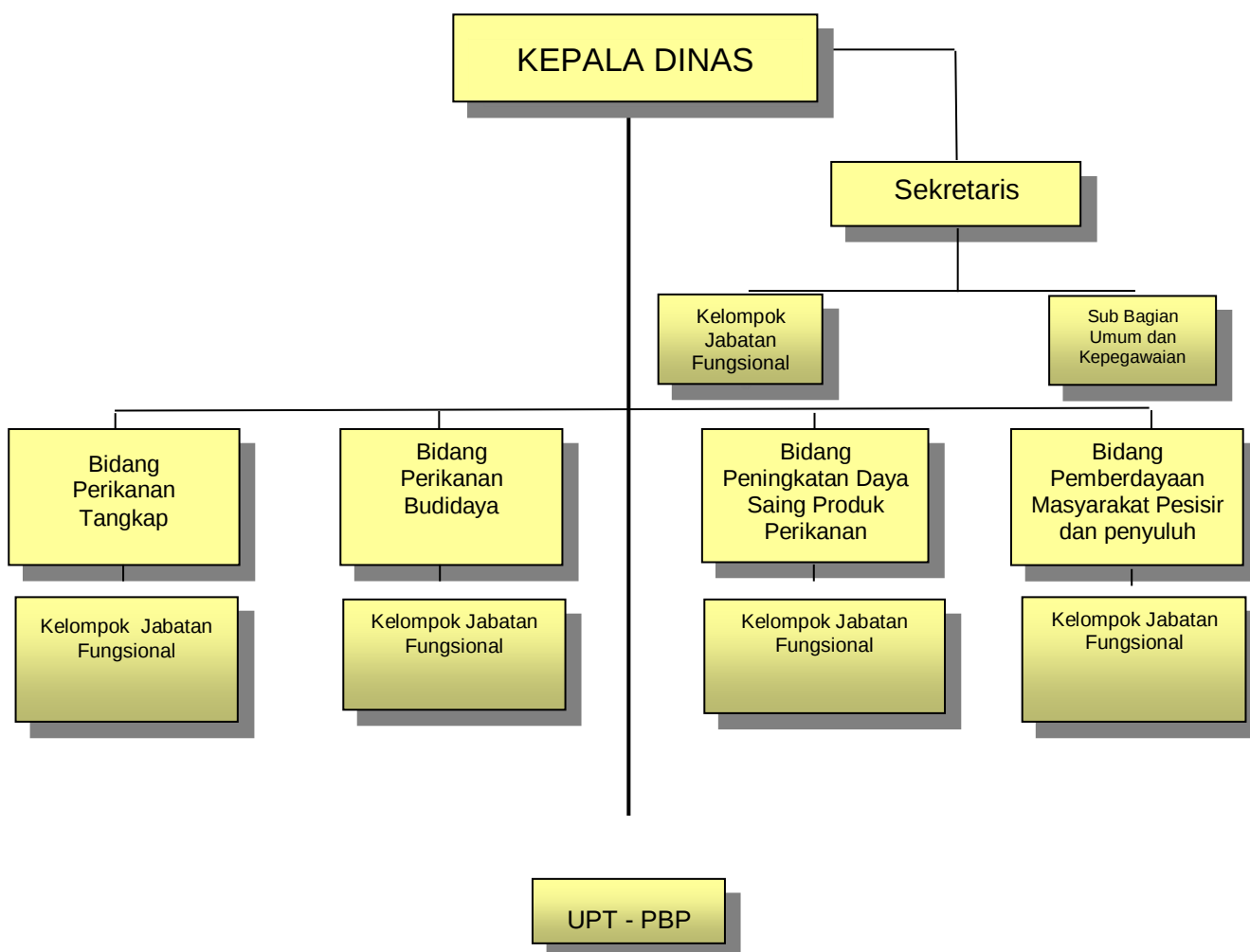


- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Bidang Perikanan tentang pembentukan Unit Pelakasna Teknis Pelayanan Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Batam, UPT Pelayanan Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pelayanan Perikanan serta tugas lain yang diberikan kepala dinas sebagaimana tertuang dalam Perwako No. 19 tahun 2018.

1. Struktur Dinas

Sebagaimana diatur dalam Perwako No. 78 Tahun 2021 bahwa Dinas Perikanan Kota Batam memiliki struktur organisasi seperti pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam





2. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan fungsi dan tugasnya didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dengan jenjang pendidikan Sarjana (Strata satu/S1 dan Strata dua/S2) 68,08%, Diploma 25,53%, dan SLTA 6,38%. Terdiri dari 77 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 1.1 Jumlah SDM Menurut Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1
7.	Fungsional PPPK	29
8.	Fungsional	15
9.	Pelaksana/Staf	24
10.	Tenaga Kontrak Administrasi	7
	Tenaga Kontrak Pendamping Lapangan	10
Total		94

Tabel 1.2 Jumlah SDM Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2024

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina/IV	6
2.	Penata/III	40
3.	PPPK	29
4.	Pangatur/II	2
5.	Tenaga Kontrak	17
Total		94

Tabel 1.3. Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2/Pasca Sarjana	5
2.	Strata 1/Sarjana/DIV	59
3.	Diploma IV	15
4.	Diploma III	9
5.	SLTA/Sederajat	6



Total	94
--------------	-----------

3. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan Belanja Operasioanl Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2023 dari alokasi dana APBD Kota Batam sebesar Rp. 25.785.595.542,- (Dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), untuk 4 (empat) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4. JARINGAN STAKEHOLDER PERIKANAN

Jaringan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kota Batam meliputi :

- Nelayan
- Pembudidaya Ikan
- Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
- Industri Pengolah Ikan, dan
- Kelembagaan (Kelompok) usaha perikanan

Tabel 1.4. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tahun 2020 - 2024

NO.	KELOMPOK	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	724	793	757	572	579
2.	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	241	298	292	242	284
3.	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Ikan (POKLAHSAR)	143	150	150	164	172
JUMLAH		1.108	1.241	1.199	978	1.035



5. ISU STRATEGIS OPD TAHUN 2024

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Aspek Ekonomi

- Naiknya harga BBM subsidi sehingga meningkatnya biaya produksi nelayan.
- Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah
- Kurang berkembangnya pasar domestic dan pengamanan kualitas ikan
- Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

2. Aspek Sosial

- Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah
- Teknologi dan system produksi yang terbatas

3. Aspek Lingkungan

- Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai
- Penurunan Kualitas lingkungan/perairan

4. Aspek Kelembagaan

- Kualitas kelompok Nelayan (KUB, POKDAKAN, dan POKLAHSAR) masih rendah
- Kualitas dan Kuantitas tenaga pendamping lapangan perikanan masih rendah
- Sistem pendataan perikanan yang belum maksimal



Isu-isu strategis tersebut diatas berdampak terhadap pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam dijabarkan sebagai berikut:

1. Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah.

Produk-produk perikanan mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan produk pangan lain seperti daging sapi dan ayam. Permasalahan yang terjadi dikarenakan usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan.

Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk olahan perikanan adalah berkurangnya lapangan kerja, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global juga akan berpengaruh pada PAD.

2. Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang sebagian besar merupakan pelaku usaha skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan di Kota Batam. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

3. Kualitas SDM Nelayan Tangkap, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah.

Pekerjaan nelayan, pembudidaya ikan merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan dan pembudidaya ikan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan dan budidaya ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga



pemasarannya, masih sangat terbatas. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan dan pembudidaya ikan terutama di musim panceklik. Sementara, untuk para nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan yang beroperasi secara mandiri, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya maupun hasil budidayanya. Hal tersebut karena mereka umumnya bekerja secara sendiri sendiri dan tidak bekerja dalam satu serikat usaha bersama. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. Kemudian dari sisi sosial-ekonomi, tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya skala kecil juga akan sulit untuk ditingkatkan karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas dalam manajemen usaha, sehingga di saat musim panen akan menghamburkan pendapatannya dan di musim panceklik mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan pendapatannya.

4. Teknologi dan system produksi yang terbatas

Pelaku usaha perikanan yang pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak. Akses terhadap teknologi masih terbatas dan umumnya masih menerapkan system tradisional dan atau system semi intensive. Akibatnya tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Selain itu Permasalahan produksi dan teknologi ini juga berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan yang masih belum sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat pembudidaya ikan. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam karamba jarring apung



(KJA) masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasainya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.

5. Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan di Kota Batam merupakan usaha skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 3 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Kota Batam. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan “limited access” secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negative berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber trophic level, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran sumberdaya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek, jika sumberdaya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat.

6. Penurunan Kualitas Lingkungan/Perairan

Permasalahan lingkungan/perairan disebabkan oleh pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan kita tinggi namun tidak semua sumberdaya tersebut dapat dikembangkan untuk perikanan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan misalnya, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan disebabkan oleh pencemaran laut seperti karena penggunaan transportasi, aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan. penebangan hutan (erosi yang



menimbulkan pelepasan dan dekomposisi bahan-bahan kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan sungai, pengelolaan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbalan (upwelling) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.

7. Sistem pendataan perikanan yang belum maksimal.

Pendataan perikanan termasuk hal utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pendataan perikanan merupakan input utama dalam menentukan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan kemudian. Saat ini pencatatan data perikanan belum maksimal serta masih parsial. Penyebabnya utamanya adalah belum dibangunnya sistem basis data yang komprehensif dan bersifat pro-aktif. Selain itu, juga karena terbatasnya SDM pengelola data perikanan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan. Dampak yang dihasilkan dari ketidakakuratan data perikanan adalah terciptanya rumusan kebijakan pembangunan perikanan yang tidak tepat sasaran, sehingga menghasilkan pengelolaan yang salah.

Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan Kota Batam

1. Mewujudkan daya saing terhadap produk perikanan, baik hasil tangkap, hasil budidaya maupun hasil olahan perikanan
2. Terbatasnya kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan untuk pengembangan usaha
4. Terbatasnya fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan
5. Pengumpulan, Kompilasi dan analisis data perikanan yang belum akurat

Mengacu kepada lima tantangan yang disampaikan di atas, berikut adalah lima rekomendasi yang dapat disampaikan :

1. Meningkatkan daya saing produk perikanan, baik hasil tangkap, hasil budidaya maupun hasil olahan perikanan
2. Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan perikanan



3. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan.
4. Meningkatkan fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan
5. Pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan

1.5 Sistematika dan Kerangka Penyusunan LKjIP

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam sebagai berikut :



IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam.

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, gambaran umum wilayah kerja, gambaran Umum Dinas Perikanan Kota Batam; isu strategis OPD Tahun 2019, sistematika dan kerangka Penyusunan LkjIP.

Bab II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Perikanan Kota Batam 2016-2021 Perubahan dan penetapan kinerja tahun 2019.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada sub bab capaian kinerja disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau tahun awal Renstra;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Capaian kinerja Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV PENUTUP, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menentukan strategi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam hal anggaran dan sumber daya manusianya untuk mencapai target kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja harus mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Disisi lain pegawai juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan internal maupun peran eksternal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

A. Visi dan Misi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”** dan untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;



2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026, Dinas Perikanan diberi amanat untuk mendukung pencapaian misi pertama RPJMD Kota Batam yaitu: "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah."

Untuk mencapai Misi Pertama ini sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ditetapkan dua tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.

Untuk mencapai dua tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan.
2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam.
3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam
4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah.
5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah;
6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya
7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah

Terkait dengan dengan tujuan dan sasaran Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Perikanan Kota Batam diberikan amanah untuk mendukung tercapainya Tujuan kedua yaitu Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan



Inklusif dan mendukung tercapainya sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.

Untuk mewujudkan sasaran ke-6 yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Oleh sebab itu program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2021-2026 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran ke-6 yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu **meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan**. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, Dinas Perikanan menetapkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam table berikut :



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) 1. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.	1.1. Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap. 1.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan dan Penyediaan Data/ Informasi Perikanan Tangkap. 1.1.3 Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Nelayan Kecil. 1.1.4 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil.



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		2. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	2.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya.	1. Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya. 2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya. 3. Pembinaan dan Peman-tauan Pembudidayaan Ikan. 4. Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. 5. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyeleng-garaan Pendidikan dan Pelatihan. 6. Penyediaan Data/Informasi Perikanan Budidaya.
		3. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	3.1 Mengoptimalkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan. 2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha olahan hasil Perikanan Skala Mikro. 3. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				4. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.



C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran periode 2021-2026, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum pada table berikut.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN). (Difokuskan kepada nelayan kecil)	(indkes yang diterima nelayan/ indeks yang dikeluarkan nelayan) x 100	100,3	102	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	1. Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	$[(\text{jumlah produksi nelayan kecil tahun } n - \text{jumlah produksi nelayan kecil tahun } n-1) / \text{jumlah produksi nelayan kecil tahun } n-1] \times 100\%$	1,01%	1%	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Budidaya



		2. Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan	$\left[\frac{\text{jumlah produksi pembudidaya ikan tahun } n - \text{jumlah produksi pembudidaya ikan tahun } n-1}{\text{jumlah produksi pembudidaya ikan tahun } n-1} \right] \times 100\%$	2,12%	2%	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
		3. Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan	$\left[\frac{\text{jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun } n - \text{jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun } n-1}{\text{jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun } n-1} \right] \times 100\%$	-12%	1%		Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.



Terkait Tujuan Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan yang menggunakan nilai tukar nelayan (NTN) sebagai indikator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaku utama yang dominan pada sector perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternative. Oleh sebab itu NTN dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

2.2. Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk membuat Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dibuat secara hirarki secara tertulis dari Kepala Dinas Perikanan Kota Batam kepada Walikota Batam. Kemudian dari pejabat eselon 3 kepada kepala dinas, staf/pelaksana kepada pejabat eselon 3, pejabat fungsional kepada eselon 3. Perjanjian Kinerja merujuk pada capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam yang mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021- 2026 berikut perubahannya. Perjanjian Kinerja berisi pelaksanaan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Batam pada Tahun 2024 berikut indikatornya. Adapun substansi yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, target kinerja, tolok ukur indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan (Input, Output, dan Outcome) sesuai dokumen DPA-OPD yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja. Uraian dari tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Dinas (Eselon II) sebagai mana tertera dalam tabel di bawah dan setiap Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dinas Perikanan sebagaimana dalam halaman lampiran.

**Tabel 2.3 Target Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Nilai Tukar nelayan (NTN)	Nilai	102
2.	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	%	1
		Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan	%	2
		Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan	%	1

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kota Batam, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana table 2.3 diatas maka Dinas Perikanan Kota Batam melaksanakan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 - 2026. Adapun rencana program dan kegiatan urusan bidang perikanan di tahun anggaran 2024 sebagai diuraikan di bawah ini.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diarahkan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil di Kota Batam sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan kecil dengan harapan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi nelayan kecil di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota.



- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan di Kota Batam sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dengan harapan berdampak pada kesejahteraan pembudidaya ikan di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan.
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi pengolah hasil perikanan di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan pengolah hasil perikanan dengan harapan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pengolah hasil perikanan di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dapat tercapai sehingga urusan perikanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dapat terlaksana dengan baik.



Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor

Kelompok Sasaran; Kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam adalah nelayan kecil, pembudidaya Ikan, Pengolah dan pemasar hasil perikanan dan unit pengolahan ikan (UPI), dan kariawan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.



Lokasi Penyebaran Program dan Kegiatan; Lokasi penyebaran program dan kegiatan meliputi seluruh wilayah Kota Batam baik mainland maupun yang berada di hinterland (pulau-pulau).

Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif; Adapun Pagu indikatif yang direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 25.785.595.542,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).** Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 dirinci dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2024			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil	19.954 ton	20.765 ton	7.748.771.600,-	APBD	Kota Batam
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	21 kelompok	3 kelompok	7.748.771.600,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	500 orang	357 orang	6.810.726.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1.500 unit usaha	3.444 unit usaha	938.045.600,-	APBD	Kota Batam
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7.235 ton	7.831 ton	1.155.997.000,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	220 pembudidaya ikan	308 pembudidaya ikan	1.155.997.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	140 unit	150 unit	1.155.997.000,-	APBD	Kota Batam
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1.290,49 ton	1.342,89 ton	2.039.100.100,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	120 unit	600 unit	1.288.466.100,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	120 unit	600 unit	1.288.466.100,-	APBD	Kota Batam

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2024			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	51.274 ton	53.355,93 ton	750.634.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	513 ton	528 ton	750.634.000,-	APBD	Kota Batam
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penun-jang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	14.841.726.842	APBD	Kota Batam
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	13.157.053.462	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	74 orang/bulan	13.157.053.462	APBD	Kota Batam
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	335.932.500,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	2.416.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	3 paket	146.990.500,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 paket	2 paket	16.224.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2 paket	17.116.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	153.186.000,-	APBD	Kota Batam

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	93.480.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	1 paket (25 unit)	14.475.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	25 unit	79.005.000,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	966.230.880,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	145.373.200,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	820.857.680,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	289.030.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	12 unit	12 unit	229.480.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	24 unit	25 unit	18.010.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	41.540.000,-	APBD	Kota Batam
JUMLAH				25.785.595.542,-		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja Organisasi diukur berdasarkan tingkat capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis OPD beserta capaian target tiap bidang yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas tingkat pencapaian indikator kinerja, digunakan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kode Predikat Kinerja
1.	≥91%	Sangat tinggi	
2.	76% - 90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017



Makna kriteria penilaian capaian kinerja tersebut atas maksudnya adalah:

(1) **Sangat Tinggi dan Tinggi**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) **Sedang**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) **Rendah dan Sangat Rendah**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan **Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026**.

A.1 TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan adalah nilai tukar nelayan (NTN) yang dalam hal ini difokuskan kepada nelayan kecil karena sesuai dengan wewenang kabupaten/ kota yaitu Pemberdayaan Nelayan Kecil. NTN digunakan sebagai indicator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan karena pelaku utama yang dominan pada sector perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternative. Oleh sebab itu NTN dapat digunakan sebagai indicator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

Target NTN pada tahun 2024 adalah sebesar 102 dengan realisasi sebesar 102,15 . Capaian kinerja tersebut melebihi target dan berpredikat **sangat tinggi**.



Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	102	102,15	Melebihi Target

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan yang mencapai target karena didukung dengan peningkatan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil yang merupakan sasaran strategis Dinas Perikanan.

NTN (nelayan kecil) dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Peningkatan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	REALISASI		
		2022	2023	2024
1	Nilai Tukar Nelayan	101,08	101,85	102,15

A.2 SASARAN: Meningkatkan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut, ditetapkan tiga indikator yaitu:

- Persentase peningkatan produksi nelayan kecil;
- Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan;
- Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan.

1. Indikator ke-1: Persentase peningkatan produksi nelayan kecil .

Target peningkatan produksi nelayan kecil Tahun 2024 dalam Renstra 2021-2026 adalah 1% (252,47 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi nelayan kecil mencapai 1,13% (285,29 ton). Dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dengan persentase capaian kinerja sebesar 113%. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

**Tabel 3.4 Capaian Indikator 1 Sasaran Dinas Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1,13	Melebihi Target

Persentase peningkatan produksi nelayan kecil dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Nelayan Kecil Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	1,05	17,35	1,13

Peningkatan Produksi Nelayan Kecil Tahun 2024 tersebut didukung oleh meningkatnya pemberdayaan terhadap nelayan kecil, yang meliputi:

- Pengembangan kapasitas nelayan kecil (dalam bentuk pemberian bantuan sarana perikanan tangkap);
- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (dalam bentuk bantuan asuransi kecelakaan kerja kepada nelayan kecil;
- Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap yang sistematis.
- Penerbitan rekomendasi pembelian BBM Subsidi bagi nelayan kecil.

Variabel tersebut merupakan target kinerja eselon III di Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dalam upaya untuk memenuhi target indikator ke-1 yaitu Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.



Tabel 3.6 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1,13	Melebihi Target
	✓ Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan sarana perikanan tangkap	orang	357	450	Melebihi Target
	✓ Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan kerja	orang	3.444	3.444	Mencapai Target
	✓ Jumlah kelompok nelayan yang dibentuk dan dikembangkan	Kelompok	50	157	Melebihi Target
	✓ Jumlah data dan informasi yang disediakan	Dokumen	4	4	Mencapai Target
	✓ Penerbitan rekomendasi pembelian BBM Subsidi bagi nelayan kecil	Surat rekomendasi	8.000	9.360	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Nelayan yang mendapatkan bantuan sarana perikanan tangkap).

Peningkatan kapasitas nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang paling menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan sarana perikanan tangkap yang dimiliki nelayan melalui pemberian sebagai berikut:



Tabel 3.6 Bantuan Sarana Perikanan Tangkap untuk Nelayan Kecil.

No	Sarana Perikanan Tangkap	Satuan	Jumlah
1	Boat pancung	unit	9
2	Speed Boat fiber ukuran 17 kaki	unit	5
3	Sampan fiber ukuran 18 kaki	unit	6
4	Mesin tempel 15 PK	unit	29
5	Mesin tempel 40 PK	unit	1
6	Mesin ketinting	unit	25
7	Bento/ bubu rajungan	Buah	9.380
8	Kawat bubu	Roll	597
9	Jaring karang tansi	Piece	289
10	Jaring ramban	Kg	2.795
11	Jaring tenggiri	Piece	86
12	Jaring lobster	Piece	51
13	Jala Tangsi	Piece	10

Sarana perikanan tangkap sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada 364 nelayan kecil.

Selain dari Pemerintah Kota Batam, bantuan sarana perikanan tangkap yang diterima nelayan kecil juga didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Bantuan sarana perikanan tangkap dari DKP Provinsi Kepri tersebut diterima oleh 105 nelayan kecil di Kota Batam dengan rincian bantuan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Bantuan Sarana Perikanan Tangkap untuk Nelayan Kecil.

No	Sarana Perikanan Tangkap	Satuan	Jumlah
1	Mesin tempel 15 PK	unit	21
2	Mesin Tempel 40 PK	unit	6
3	Mesin Ketinting	unit	26
4	Jaring Tenggiri	pcs	60



No	Sarana Perikanan Tangkap	Satuan	Jumlah
5	Bubu Ketam	buah	200
6	Jaring Udang	pcs	50
7	Pancing Ulur	unit	20

Pemberian sarana perikanan tangkap tersebut turut memberikan andil dalam meningkatkan jumlah armada perikanan tangkap nelayan kecil (ukuran ≤ 5 GT) sebagaimana tercantum di dalam table di bawah ini.

Tabel 3.7 Peningkatan Jumlah Armada Nelayan Kecil Tahun 2020-2024

NO.	ARMADA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Armada Tanpa Motor	1.836	1.836	1.851	1.822	1.782
2.	Armada Bermotor	6.794	6.848	6.873	6.908	6.914
	✓ Perahu Motor Tempel/ Ketinting	4.757	4.801	4.820	4.837	4.885
	✓ Kapal Motor < 5 GT	2.047	2.047	2.053	2.071	2.029
Jumlah Armada Tangkap		8.630	8.654	8.724	8.730	8.696

Selain armada perikanan tangkap, peningkatan jumlah alat tangkap sangat mempengaruhi kenaikan jumlah produksi nelayan kecil. Adapun peningkatan jumlah alat tangkap menurut jenis alat tangkap dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.8 Jumlah Alat Penangkap Ikan Tahun 2020 - 2024

NO.	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaring	166.750	166.996	170.704	171.404	171.875
	• Gillnet hanyut	4.370	4370	5.757	5.961	6.850
	• Jaring karang	139.720	139.950	141.370	141.750	140.570
	• Jaring bawah	8.082	8082	8.562	8.576	9.220
	• Jaring Apollo	14.527	14543	14.962	15.064	15.180
	• Jaring bilis	51	51	53	53	55
2.	Bubu	186.293	187.316	189.841	189.748	186.160
	• Bubu bento	150.293	151.056	153.296	153.603	154.580
	• Bubu Kawat	36.000	36.260	36.555	36.145	31.580
3.	Kelong	3.935	3.989	4.005	3.996	3.990
	• Kelong pantai	3.844	3.899	3.915	3.905	3.900



	• <i>Kelong bilis</i>	91	90	90	91	90
4.	Pancing	171.285	171.799	172.227	173.224	175.463
	• <i>Pancing rawai</i>	161.244	161.244	162.144	163.154	165.393
	• <i>Pancing</i>	10.041	10.041	10.083	10.070	10.070
5.	Alat tangkap lain	557	514	474	477	549
JUMLAH		528.371	528.820	530.100	538.849	534.047

b. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Nelayan yang mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan kerja).

Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha merupakan salah satu faktor yang paling menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan asuransi kecelakaan kerja kepada nelayan kecil.

Pada Tahun 2024 telah diberikan bantuan asuransi kecelakaan kerja kepada 3.444 nelayan kecil. Bantuan asuransi yang merupakan upaya Dinas Perikanan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dalam menjalankan profesi nelayan yang memiliki risiko. Dengan adanya asuransi kecelakaan kerja tersebut diharapkan nelayan kecil lebih fokus bekerja sehingga dapat meningkatkan produksi. Berikut disampaikan tabel asuransi kecelakaan kerja untuk nelayan yang dimulai Tahun 2024.

Selain dari Dinas Perikanan Kota Batam, bantuan asuransi kecelakaan kerja juga diberikan oleh DKP Provinsi Kepri untuk nelayan kecil di Kota Batam sebanyak 2.082 orang.



Tabel 3.9 Bantuan Asuransi Nelayan Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	Realisasi	
		2023	2024
1	Bantuan asuransi kecelakaan kerja bagi nelayan dari Dinas Perikanan Kota Batam (orang)	1.944	3.444
2	Bantuan asuransi kecelakaan kerja bagi nelayan dari Dinas Perikanan Kota Batam (orang)	1.944	2.082
	Jumlah	3.888	5.526



Gambar 3.1 Sosialisasi dan Penyerahan kartu Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Nelayan.

c. Meningkatnya Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil

Peningkatan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada nelayan kecil agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi nelayan lebih tertata dan terorganisir.

Dengan kuatnya kelembagaan nelayan telah terbentuk Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) dimana FKUB nelayan kecil merupakan wadah bagi nelayan kecil untuk bekerja sama agar bekerja lebih terorganisir dalam upaya untuk meningkatkan



produksi dan kesejahteraan. Peningkatan jumlah kelembagaan nelayan kecil dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.10 Jumlah Kelompok Nelayan Tercatat di Dinas Perikanan Tahun 2020 – 2024

No.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Terdaftar di Dinas Perikanan Kota Batam	724	793	757	572	579

d. Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap.

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi nelayan kecil adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) nelayan, sarana/prasarana perikanan tangkap, dan nilai produksi nelayan. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.12. Ketersediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Data dan Informasi Perikanan Tangkap (dokumen)	4	4	4	4	4

e. Penerbitaan Rekomendasi Pembelian BBM Subsidi bagi Nelayan Kecil

Penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil.

Dengan diterbitkan rekomendasi tersebut nelayan kecil dapat membeli BBM subsidi dengan harga yang terjangkau sehingga



kegiatan produksi nelayan dapat terlaksana dengan lancar. Selama Tahun 2024 telah dikeluarkan 9.360 rekomendasi kepada 1.235 nelayan. Perkembangan jumlah penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.11 Jumlah BBM dan Surat Rekomendasi yang Dikeluarkan Tahun 2020 – 2024

No.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah BBM (litr)	3.187.430	1.181.858	3.231.179	3.706.165	3.147.202
	Solar (Gas Oil)	1.091.158	650.868	2.192.149	2.057.774	1.616.190
	Bensin (Premium)	2.096272	530.990	1.039.030	1.648.391	1.531.012
2.	Jumlah Surat/ Rekomendasi BBM	4.528	1.948	8.067	9.406	9.360
	Solar/Gas Oil	1.929	778	5.361	5.103	4.355
	Bensin/Premium/Pertalite	2.599	11.170	2.706	4.303	5.005

2. Indikator ke-2: Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan

Target peningkatan produksi pembudidaya ikan Tahun 2024 dalam Renstra 2021-2026 adalah 2% (197,15 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi pembudidaya ikan mencapai 2,01% (198,13 ton). Dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,5%. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

Tabel 3.13 Capaian Indikator ke-2 Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	2,01	Melebihi Target

Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.



Tabel 3.15 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan (%)	1,87	13,41	30,81	2,01

Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2024 sebesar 2,01% dibanding tahun 2023. Peningkatan ini didukung kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang meliputi:

- Penyediaan sarana pembudidayaan ikan;
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang sistematis;
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan;
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Variabel tersebut merupakan target kinerja eselon III di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dalam upaya untuk memenuhi target indikator ke-2 yaitu Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	2,01	Melebihi Target
	✓Jumlah bantuan sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	unit	150	150	Mencapai Target
	✓Pemantauan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	lokasi	12	76	Mencapai Target



✓ Jumlah data dan informasi yang disediakan	doku- men	1	1	Mencapai Target
✓ Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan	orang	308	911	Melebihi Target
✓ Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang dibentuk dan dikembangkan	Kelom- pok	4	65	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

1) Penyediaan Sarana Budidaya Ikan

Peningkatan jumlah sarana budidaya merupakan salah satu faktor yang paling menunjang dalam peningkatan produksi pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan sarana perikanan budidaya sebanyak 150 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Tahun 2024

No	Sarana Perikanan Tangkap	Satuan	Jumlah
1	Bioflok	set	79
2	Bibit Ikan Kakap Putih	ekor	10.250
3	Jaring Kelong	kg	500
4	Pakan Ikan Air Tawar	kg	4.700
5	akan Ikan Air Laut	kg	520

Selain dari Dinas Perikanan Kota Batam, bantuan sarana perikanan budidaya yang diterima pembudidaya ikan skala kecil di Kota Batam juga berasal dari DKP Provinsi Kepri. Bantuan dari DKP Provinsi



tersebut telah diberikan kepada 9 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Bantuan Sarana Perikanan Budidaya dari DKP Provinsi Kepri Tahun 2024

No	Sarana Perikanan Tangkap	Satuan	Jumlah
1	Pakan Ikan Air Tawar	kg	7.552
2	Bibit Ikan Kerapu Cantang	ekor	3.200
3	Jaring Keramba Apung	unit	50

Bantuan tersebut membantu meningkatkan jumlah sarana budidaya (kolam, keramba dan tambak) sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.16 Jumlah Sarpras Budidaya Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH SARPRAS BUDIDAYA (kolam, keramba dan tambak)			1.984	2.012	2.012	2.012	
1.	Air Tawar	Unit	1.406	1.407	1.407	1.475	
2.	Air Payau	Unit	25	40	40	81	
3.	Air Laut	Unit	628	649	635	756	

2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya penting untuk dilakukan karena sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya. Dengan dilakukan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya secara teratur akan mencegah serangan penyakit terhadap ikan yang dapat menurunkan produksi budidaya.

Tabel 3.17 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Tahun 2020 - 2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemantauan kesehatan ikan dan	Lokasi	12	12	12	12	76



lingkungan budidaya						
------------------------	--	--	--	--	--	--

3) Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pembudidaya ikan, sarana/prasarana perikanan budidaya, dan nilai produksi budidaya. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.18. Ketersediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokumen Data dan Informasi (dokumen)	4	4	4	4	4

4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan.

Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan perlu terus dilakukan agar para pembudidaya ikan tetap aktif berproduksi. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pembinaan dan pemantauan terhadap 911 pembudidaya ikan. Perkembangan rumah tangga perikanan (RTP) budidaya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.19 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH RTP BUDIDAYA			2.451	2.515	2.515	2.515	
1.	Air Tawar	RTP	788	790	843	1.045	
2.	Air Payau	RTP	92	103	128	168	
3.	Air Laut	RTP	1.432	1.420	1.420	1.709	
4.	Rumput Laut	RTP	80	80	80	80	
5.	Ikan Hias	RTP	164	174	254	254	



5) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi perikanan budidaya. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan kecil agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi pembudidaya ikan menjadi lebih tertata dan terorganisir.

Peningkatan jumlah kelembagaan pembudidaya ikan kecil dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.20 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Tercatat di Dinas Perikanan Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibentuk dan dikembangkan	275	313	292	242	284

3. Indikator ke-3: Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan

Target peningkatan produksi pengolah hasil perikanan Tahun 2024 dalam Renstra 2021-2026 adalah 1% (14,34 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi pengolah hasil perikanan mencapai 1,16% (16,64 ton) atau melebihi target Renstra. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

Tabel 3.21 Capaian Indikator ke-3 Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	1,16	Melebihi Target



Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.22 di bawah ini.

Tabel 3.22 Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	-5,83	9,87%	7,85%	1,16

Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2024 sebesar 1,16% dibanding tahun 2023 ini didukung beberapa variable kinerja yang meliputi:

- Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Variabel tersebut merupakan target kinerja eselon III di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dalam upaya untuk memenuhi target indikator ke-3 yaitu Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	1,16	Melebihi Target
	✓ Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil	Unit usaha	600	600	Mencapai Target



	perikanan yang mendapatkan pembinaan				
	✓ Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	ton	53.355,93	54.156,27	Melebihi Target
	✓ Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data/informasi	12	12	Mencapai Target
	✓ Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelompok	3	17	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

1) Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam peningkatan produksi pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan mutu agar proses dan hasil produksi memenuhi standar dan persyaratan. Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dari tahun 2020 – 2020 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.24 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan		20	20	20	600	600

2) Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan

Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan penting dilakukan untuk peningkatan produksi usaha pengolahan. Upaya ini dilakukan dengan cara melaksanakan monitoring



ketersediaan ikan dan melakukan sosialisasi gemar makan ikan agar konsumsi ikan meningkat dan menjadi pemicu peningkatan produksi usaha pengolahan. Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dari tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.25 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Tahun 2022 - 2024

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Jumlah Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Usaha Pengolahan (ton)	52.605,28	52.901,56	54.156,27

3) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pengolah hasil perikanan adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan untuk meningkatkan produksi. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pengolah dan pemasar hasil perikanan, sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran, ragam jenis olahan, nilai produksi pengolahan dan lainnya. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.27 Ketersediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokumen Data dan Informasi (dokumen)	4	4	12	12	12

4) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro

Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi pengolah hasil perikanan.



Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada pengolah hasil perikanan skala kecil/mikro agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi pengolah hasil perikanan lebih tertata dan terorganisir. Peningkatan jumlah kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.28 Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024

No.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan	145	154	150	164	172



Tabel 3.29. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target pada Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2023	Predikat Kinerja 2023	Bidang Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6/5)	(8)	(9)
1.1.	Nilai Tukar Nelayan	(Indeks harga yang diterima nelayan / indeks harga yang dikeluarkan nelayan) x 100	Nilai	102	102,15	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PT, Bidang PB, Bidang PDSPP, Bidang PMPP
2.1.	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	[(jumlah produksi nelayan kecil tahun n – jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1)/ jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1] x 100%	%	1	1,13	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PT, dan Bidang PMPP
2.2	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	[(jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n – jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1)/ jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1] x 100%	%	2	2,01	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PB, dan Bidang PMPP
2.3	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	[(jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n – jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n-1)/ jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n-1] x 100%	%	1	1,16	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PDSPP, dan Bidang PMPP



B. PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 secara umum dinilai telah berhasil mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.29. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Pada Perjanjian Kinerja. Dari hasil analisis diketahui bahwa semua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, seluruh capaian kinerjanya **“SANGAT TINGGI”**.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, keberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis diuraikan dalam bentuk pencapaian 4 (empat) jenis indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui bahwa ada 4 (empat) Kinerja IKU mencapai diatas **100%** dengan predikat **SANGAT TINGGI**.

Adapun Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.25**. diuraian di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA 1; Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada Renstra 2021-2026, target indicator kinerja 1 (NTN) pada akhir Renstra (2026) sebesar 103. Adapun realisasi kinerja 1 pada tahun evaluasi (2024) mencapai 102,15, sehingga capaian kinerja Renstra sampai Tahun 2024 adalah 99,17%.

INDIKATOR KINERJA 2; Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 2 pada akhir Renstra (2026) peningkatan produksi nelayan kecil sebesar 6,15% (21.182 ton) dari kondisi awal sebesar 19.954 ton. Sedangkan secara akumulasi realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil Kota Batam tahun evaluasi (2024) mencapai 25.532 ton atau 27,95% sehingga **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2024 sudah melebihi target 100%.

**INDIKATOR KINERJA 3; Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan.**

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 3 pada akhir Renstra (2026) adalah peningkatan produksi pembudidaya ikan sebesar 12,62% (8.418 ton) dari kondisi awal sebesar 7.235 ton. Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Kota Batam tahun evaluasi (2024) mencapai 10.055 ton atau sebesar 39,98% sehingga **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2024 sudah melebihi target 100%.

INDIKATOR KINERJA 4; Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 3 pada akhir Renstra (2026) adalah peningkatan produksi pengolah hasil perikanan sebesar 6,15% (1.369,88 ton) dari kondisi awal 1.290,49 ton. Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Kota Batam tahun evaluasi (2024) mencapai 1.450,78 ton atau sebesar 12,42% sehingga **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2024 sudah melebihi target 100%.



Tabel 3.30. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2024	Target dan Realisasi IKU Tahun 2024			Realisasi Capaian IKU Renstra s/d Tahun 2024 (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan							
	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	102	102	102,15	Melebihi Target	98,88
Sasaran : Meningkatnya Produksi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan							
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1	1,13	Melebihi Target	100
2	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	2	2,01	Melebihi Target	100
3	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	1	1,16	Melebihi Target	100



3.2 REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk belanja Operasional dan belanja Modal lingkup Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 25.785.595.542,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.943.020.709,- sebagaimana pada Tabel di bawah.

Tabel 3.31 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024

No.	Jenis Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasional	25.692.115.542	24.857.550.709	96,76
2.	Belanja Modal	93.480.000	85.470.000	91,44
TOTAL		25.785.595.542	24.943.020.709	96,76

Dari Tabel 3.31 diketahui bahwa Capaian Kinerja serapan anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah 96,76% menunjukkan bahwa Capaian Kinerja predikat **“TINGGI”**.

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara Capaian Input dan Capaian Output. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *ouput* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sementara realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan *in-efisien* disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektivitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan



pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pada Tahun 2024 Dinas Perikanan Kota Batam memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 25.785.595.542,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.943.020.709,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah). Seluruh kegiatan terlaksana dengan efisien sebagaimana tertera pada Tabel 3.34. dibawah ini.

Tabel 3.34 Analisa Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Tahun 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR	ANGGARAN			Outcome		Output		EFISIEN/E FEKTIF
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target	Realisasi/ (Persentase)	Target	Realisasi / (Persentase)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=r (d/c)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator: Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah								
		14.841.726.842	14.605.117.699	98,41%	100%	100%			Efektif dan Efisien
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi								
		13.157.053.462	12.994.778.370	98,77%			100%	100%	Efektif dan Efisien
1.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		335.932.500	299.012.901	89,01%			100%	100%	Efektif dan Efisien
1.3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Indikator: Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi								
		93.480.000	85.470.000	91,43%			100%	100 %	Efektif dan Efisien
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Indikator: Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi								
		966.230.880	951.203.428	98,44%			100%	100 %	Efektif dan Efisien
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Indikator: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi								
		289.030.000	274.653.000	95,03%			100%	100 %	Efektif dan Efisien
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Indikator: Jumlah produksi nelayan kecil								
		7.748.771.600	7.409.827.048	95,62	20.765 Ton	25.532 Ton (100%)			Efektif dan Efisien



No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR	ANGGARAN			Outcome		Output		EFISIEN/E FEKTIF
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target	Realisasi/ (Persentase)	Target	Realisasi / (Persentase)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=r (d/c)
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya								
		7.748.771.600	7.409.827.048	95,62			3 kelompok	45 kelompok/ (100%)	Efektif dan Efisien
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Indikator: Jumlah produksi pembudidayaan ikan								
		2.039.100.100	1.893.717.962	91,75%	7.831 ton	10.055 ton (100%)			Efektif dan Efisien
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator: Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi standar sesuai SOP								
		2.039.100.100	1.893.717.962	91,75%			308 orang	911 orang (100%)	Efektif dan Efisien
IV	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Indikator: Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan								
		2.039.100.100	1.893.717.962	92,87	1.329,59 ton	1.433,98 ton (100%)			Efektif dan Efisien
4.1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Indikator : Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan								
		1.288.466.100	1.182.171.220	91,75			600 unit usaha	600 unit usaha (100%)	Efektif dan Efisien
4.2	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator: Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan								
		750.634.000	711.546.742	94,79%			53.355,93 ton	54.072,8 ton (100%)	Efektif dan Efisien
TOTAL		25.785.595.542	24.943.020.709	96,73 %					





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024

- 1) Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 seluruhnya berpredikat diatas 91% "**SANGAT TINGGI**" , adapun indikatornya adalah :
 1. Nilai Tukar Nelayan
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan
 4. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.
- 2) Capaian indicator kinerja Sasaran strategis dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : >100%
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil : >100%
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan : >100%
 4. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan : >100%
- 3) Capaian indicator kinerja Sasaran strategis dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 98,88%
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil : 100%
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan : 100%
 5. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan : 100%

4.2. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

Pagu anggaran belanja langsung APBD Kota Batam T.A. 2024 Dinas Perikanan Kota Batam untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator kinerja sebesar 25.785.595.542,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.943.020.709,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat puluh yiga juta dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah)capaian 96,76%.



4.3 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang diinventarisasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan belum maksimal.
- 2) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City (REC) di Pulau Rempang Kecamatan Galang berpotensi menurunkan produksi perikanan terutama produksi perikanan budidaya. Hingga Tahun 2024 Pulau Rempang masih menjadi sentra produksi perikanan budidaya terumata budidaya udang dan ikan air tawar. Dengan dimulainya PSN Rempang Eco City yang diperkirakan pada Tahun 2025 tambak dan kolam budidaya berpotensi tidak dapat beroperasi lagi.
- 3) Kualitas SDA Perikanan perairan Kota Batam semakin menurun
- 4) Kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan belum memadai
- 5) Jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan belum memadai.

4.4 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pagu anggaran untuk Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan. Untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu dikembangkan budidaya system resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan yang kosong.
- 2) Meningkatkan pagu anggaran armada dan alat tangkap ikan berkapasitas diatas 2 GT.
- 3) Meningkatkan intensitas kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah/pemasar hasil perikanan.
- 4) Meningkatkan jumlah pendamping lapangan perikanan yang kapabel.

Semoga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024** ini dapat menjadi informasi acuan dalam penyusunan



perencanaan dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang semakin berkualitas dan mendorong tumbuhnya kesadaran individu dan kesadaran kolektif dalam mengembangkan etos kerja aparatur Dinas Perikanan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kota Batam.

Batam, Februari 2025
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam

Yudi Admajianto, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001



Lampiran